Pembebasan Lahan Duplikasi Kapuas I Ditarget Selesai Mei

PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pergantian tahun harus menjadi refleksi untuk pembangunan pada 2020. Untuk itu, Pemkot Pontianak akan tetap fokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan khususnya pada *capacity building* untuk pemberdayaan masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, Pemkot Pontianak akan fokus pada pembebasan lahan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I. Tim appraisal (penilai) sudah bekerja dan pembayaran akan dilakukan pada 2020.

"Target pada bulan April atau Mei 2020, pembebasan lahan duplikasi Jembatan Kapuas I sudah harus selesai. Jika lebih cepat maka akan lebih bagus agar lebih pasti. Pemkot Pontianak juga telah menganggarkan Rp40 miliar untuk pembebasan lahan tersebut," ucap Edi, usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (2/1).

Edi menegaskan, dalam proses pembebasan lahan harus ada komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat pemilik lahan sekitar lokasi pembangunan.

Selain jembatan, pada 2020 juga akan dilakukan pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah Pontianak Utara. Rumah sakit tersebut akan sama dengan rumah sakit pada umumnya, dimana ada ruang rawat inap, UGD dan lainnya.

"Sementara untuk pembenahan trotoar dan sekolah akan tetap menjadi fokus Pemkot Pontianak, serta penyempurnaan jalan Jembatan Landak juga akan menjadi perhatian," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak juga menyerahkan penghargaan dari Menteri PAN RB tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) dan Rumah Sakit Kota Pontianak.

Kemudian juga ada penyerahan penghargaan bagi OPD yang telah melaksanakan anggaran sesuai target, serta penyerahan Rencana Anggaran Kerja untuk 2020.

"Pada 2020 kita berharap pelayanan semakin meningkat, prima sehingga target dan sasaran RPJMD serta visi misi bisa terpenuhi," katanya.

Edi mengungkapkan,

• Baca Halaman 15

pada 2019 secara umum serapan anggaran mencapai 96,4 persen. Untuk anggaran yang tidak terserap disebabkan beberapa hal, diantaranya karena waktu sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).

"Pada 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp1,860 triliun. 36,4 persen merupakan belanja tidak langsung dan sisanya belanja langsung," pungkasnya.

Kepala DPMTK-PTSP Kota Pontianak, Junaidi mengatakan, penghargaan yang diterima tidak hanya sampai di Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Namun tentu akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Ia menegaskan saat ini untuk pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar (pungli). Pelayanan prima juga diberikan kepada masyarakat.

"Pelayanan yang responsif juga diberikan kepada masyarakat," ucapnya.

Dia menambahkan, masyarakat yang dilayani harus merasa nyaman. Serta pelayanan juga harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Transparansi juga harus dikedepankan dalam pelayanan.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Dian Eka Muchairi berharap dalam proses pembebasan lahan agar mengedepankan humanisme. Sehingga masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan.

Ia menyebutkan hingga saat ini masih belum ada keluhan dari masyarakat. Warga juga mengapresiasi adanya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu.

"Kita berharap Pemkot sebagai perwakilan pemerintah pusat bisa menyelesaikan masalah ganti rugi pembebasan lahan dengan humanis," ucapnya.

Dia mengatakan, tujuan utama pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu adalah untuk menekan kemacetan, terutama arus yang menuju Pontianak Timur. Dengan pembangunan yang juga didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. **(din)**